

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA KENDARI



Alamat : Jln ZA Sugianto No. 39 Kota Kendari -
Provinsi Sulawesi Tenggara

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari dapat menyelesaikan penyusunan Renja PD tahun 2023.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja PD menjadi landasan atau pedoman bagi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja PD ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terima kasih.

Kendari, April 2022
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Kendari

Drs. H. JAHUDDING, M.Si
Pembina Tk.I Gol.IV/b
NIP. 19680303 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....1

BAB I3

PENDAHULUAN.....3

1.1 LATAR BELAKANG..... 3

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud Dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II.....8

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... 24

BAB III25

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....25

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 25

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah..... 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN28

BAB V PENUTUP.....34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2023-2026 untuk menurunkan angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun). Pencapaian target/sasaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2023– 2026 dilaksanakan secara bertahap setiap tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 - 2026. Renja Tahun 2023 dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2023 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam waktu 1 (satu) tahun, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja-PD merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

23. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah kota Kendari no 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
29. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari.
30. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2036.
31. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen pembangunan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana baik Pemerintah, maupun masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkesinambungan. Diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPD Kota Kendari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu & Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Kebijakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan pada upaya pengendalian kelahiran melalui kesadaran masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 meliputi program- program sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian Penduduk;
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 8.964.513413,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.969.856.750,- (88,9 %), Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp.13.212.106.164. Adapun hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Indikator PD

No.	Indikator	Realisasi Capaian	
		2020	2021
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,93	1,91
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,84	2,81
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	62,73%	63,36%
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	25,45%	25,71%

5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1,73	1,74
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	19,09	19,28
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	277,27	280,07
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,18	1,90
9	Ratio akseptor KB	35,45%	35,81%
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	34,55%	34,89%
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	0,36%	0,35%
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,68%	0,67%
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	31,76%	31,13%
14	Presentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	23,64%	23,88%
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	90,91%	91,83%
16	Cakupan anggota BinA Keluarga Balita (BKB) ber-KB	47,27%	47,75%
17	Cakupan anggota BinA Keluarga Balita (BKR) ber-KB	28,18%	28,47%
18	Cakupan anggota BinA Keluarga Balita (BKL) ber-KB	3,09%	3,12%
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	80,91%	81,73%
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	409,09%	413,22%
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	90,91	90,91
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	29%	29%

23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	61%	62%
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	65%	66%
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	35%	35%
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0%	0%
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	91%	91%
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	5%	5%
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	20 th	20 th
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	10,00%	10,10%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Kendari

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		6	7	8=7/6	9	10=(7+9)	11=(10/4)
21401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100			100		
21401201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaaam Anggaran Yang Tersedia	100	%	100			100		
2140120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dok	1	0	0%	2	2	100%
2140120102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	dok	1	0	0%	1	1	10%
2140120103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	dok	1	0	0%	1	1	10%
2140120104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	dok	1	0	0%	1	1	10%
2140120105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	dok	1	0	0%	1	1	10%
2140120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	dok	1	1	100%	1	2	20%
2140120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	lap	1	0	0%	1	1	20%
21401202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100	%	100			100		
2140120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	org	12	12	100%	12	24	40%
2140120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
2140120203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	dok	5	0	0%	5	5	100%
2140120204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
2140120205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	lap	10	0	0%	12	12	120%
2140120206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	lap	5	0	0%	1	1	20%
2140120207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	lap	12	12	100%	12	24	240%
2140120208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	dok	1	0	0%	1	1	20%
21401203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah yang Tersedia	100	%	100			100		0%
2140120301	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	dok	5	0	0%	1	1	20%
2140120302	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
2140120303	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	lap	1	0	0%	1	1	100%
2140120304	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	lap	4	0	0%	3	3	75%
2140120305	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	lap	4	0	0%	3	3	75%
2140120306	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1	lap	1	0	0%	1	1	100%
2140120307	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
21401205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Yang Tersedia	100	%	100			100		
2140120501	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	unit	1	0	0%	1	1	100%
2140120502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	org	60	0	0%	50	50	83%

2	14	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
2	14	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
2	14	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10	dok	10	0	0%	10	10	100%
2	14	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	org	4	0	0%	2	2	50%
2	14	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60	org	30	0	0%	50	50	83%
2	14	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	org	1	0	0%	6	6	120%
2	14	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	100	%	100			100		
2	14	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	pkt	1	0	0%	1	1	100%
2	14	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	pkt	1	1	100%	1	2	200%
2	14	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	pkt	1	0	0%	1	1	100%
2	14	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	pkt	1	1	100%	1	2	200%
2	14	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	pkt	1	1	100%	1	2	200%
2	14	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	pkt	1	0	0%	1	1	100%
2	14	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu di OPD	100	org	100	0	0%	80	80	80%
2	14	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	oh	8	4	50%	60	64	107%
2	14	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
2	14	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	dok	1	0	0%	1	1	20%
2	14	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100			100		
2	14	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	1		0%	0	0	0%
2	14	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	unit	10	0	0%	30	30	0%
2	14	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	pkt	10	0	0%	10	10	100%
2	14	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	unit	10	0	0%	5	5	50%
2	14	01	207	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10	unit	10	0	0%	3	3	30%
2	14	01	207	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	pkt	1	0	0%	1	1	100%
2	14	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit	1	0	0%	1	1	50%
2	14	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	unit	12	0	0%	12	12	100%
2	14	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	pkt	5	0	0%	5	5	100%
2	14	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	100	%	100			100		
2	14	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	lap	2	0	0%	1	1	50%
2	14	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	lap	2	2	100%	1	3	150%
2	14	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	org	5	0	0%	1	1	20%
2	14	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	66	org	50	50	100%	55	105	159%
2	14	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100	%	100			100		
2	14	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	5	0	0%	5	5	100%
2	14	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95	unit	95	95	100%	115	210	221%
2	14	01	209	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	100	unit	100	0	0%	50	50	50%
2	14	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	102	unit	102	0	0%	102	102	100%
2	14	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	unit	50	20	40%	10	30	30%

2	14	01	209	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10	unit	5	0	0%	1	1	10%
2	14	01	209	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	unit	1	0	0%	1	1	100%
2	14	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	1	1	100%	6	7	58%
2	14	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	12	0	0%	12	12	100%
2	14	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	12	0	0%	12	12	100%
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	1.74	Jiwa	1.74			1.74		
2	14	02	201		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	2		2			2.04		
						Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	312		312			313		
						Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	%	100			100		
2	14	02	201	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	2	dok	2	0	0%	2	2	100%
2	14	02	201	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
2	14	02	201	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	100	org	100	0	0%	50	50	50%
2	14	02	201	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	50	org	50	0	0%	20	20	40%
2	14	02	201	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	10	dok	5	0	0%	5	5	50%
2	14	02	201	06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	10	dok	5	0	0%	5	5	50%
2	14	02	201	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	5	materi	1	0	0%	3	3	60%
2	14	02	201	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	5	materi	1	0	0%	3	3	60%
2	14	02	201	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	100	org	100	0	0%	50	50	50%
2	14	02	201	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	50	org	50	0	0%	25	25	50%
2	14	02	201	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	50	org	50	0	0%	25	25	50%
2	14	02	201	12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	100	org	100	0	0%	50	50	50%
2	14	02	201	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	100	org	100	0	0%	50	50	50%
2	14	02	201	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	100	org	100	0	0%	50	50	50%
2	14	02	201	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	50	org	50	0	0%	25	25	50%
2	14	02	202		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	73	%	70			72.42%		
						Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	31	%	30			29.58%		

						Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	14.37	%	14			12.62%		
						Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	24	%	20			22.44		
2	14	02	202	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
2	14	02	202	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
2	14	02	202	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2	dok	2	0	0%	1	1	50%
2	14	02	202	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
2	14	02	202	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
2	14	02	202	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
2	14	02	202	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>Early Warning System</i> /Peringatan Dini)	Jumlah Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>Early Warning System</i> /Peringatan Dini)	1	dok	1	0	0%	1	1	100%
2	14	02	202	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	5	Lokasi	3	3	100%	2	5	100%
2	14	02	202	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12	laporan	12	0	0%	3	3	25%
2	14	02	202	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	5	data	5	0	0%	1	1	20%
2	14	02	202	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	5	dok	5	5	100%	3	8	160%
2	14	02	202	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12	dok	12	0	0%	3	3	25%
2	14	02	202	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	dok	12	13	108%	3	16	133%
2	14	02	202	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	6	laporan	6	0	0%	3	3	50%
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	100	%	100			90.69%		
						Ratio Akseptor KB	45	%	45			40.80%		
2	14	03	201		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	21.7	%	21.7			6.83%		
2	14	03	201	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100	org	100	0	0%	50	50	50%
2	14	03	201	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Realisasi Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	5	dok	5	0	0%	3	3	60%
2	14	03	201	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Tempat Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK yang tersalurkan	11	lokasi	11	0	0%	11	11	100%
2	14	03	201	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6	dok	6	6	100%	3	9	150%
2	14	03	201	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	3	keg	3	0	0%	3	3	100%
2	14	03	201	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Cakupan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100	org	100	100	100%	59	159	159%
2	14	03	201	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Cakupan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	430	org	150	130	87%	150	280	65%
2	14	03	201	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Pengendalian Program KKBPK	1	laporan	1	0	0%	1	1	100%
2	14	03	202		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	%	100			100		
2	14	03	202	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100	org	100	0	0%	50	50	50%
2	14	03	202	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Cakupan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	16	pkt	15	15	100%	16	31	194%
2	14	03	202	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	laporan	12	12	100%	12	24	200%

2	14	03	203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	71	%	71			70.75%			
					Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	0.23	%	0.23			0.23			
					Presentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	29.83	%	29.83			28.39%			
2	14	03	203	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	lap	12	12	100%	12	24	200%
2	14	03	203	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	500	org	75	0	0%	75	75	15%
2	14	03	203	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	100	org	50	0	0%	75	75	75%
2	14	03	203	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Cakupan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5	org	5	0	0%	5	5	100%
2	14	03	203	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12	dok	12	0	0%	12	12	100%
2	14	03	203	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Cakupan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	10	pkt	10	10	100%	10	20	200%
2	14	03	203	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	500	org	150	0	0%	250	250	50%
2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	lap	12	12	100%	12	24	200%
2	14	03	203	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Cakupan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	100	org	100	0	0%	50	50	50%
2	14	03	203	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Cakupan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50	org	50	0	0%	25	25	50%
2	14	03	203	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Cakupan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	60	gerak	30	25	83%	40	65	108%
2	14	03	203	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100	org	50	0	0%	75	75	75%
2	14	03	203	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Cakupan Peningkatan Kesertaan KB Pria	20	org	10	0	0%	10	10	50%
2	14	03	204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	75	%	74			74.54%			
					Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0.55	%	0.54			0.54			
2	14	03	204	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	10	klpk	10	0	0%	10	10	100%
2	14	03	204	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12	keg	12	0	0%	12	12	100%
2	14	03	204	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	324	keg	200	0	0%	250	250	77%
2	14	03	204	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	324	lap	200	0	0%	250	250	77%
2	14	04			Program Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	44	%	44			41.73%		
2	14	04	201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	64	%	64			55.56%			
					Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	43	%	43			33.32%			
					Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	9	%	9			3.66%			
					Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	92	%	92			92.73%			
					Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	474	%	474			481.44%			
					Rata-rata usia kawin pertama wanita	20	Tahun	20			20 th			
2	14	04	201	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	25	klpk	15	0	0%	20	20	80%
2	14	04	201	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25	klpk	15	0	0%	20	20	80%

2	14	04	201	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100	org	50	0	0%	75	75	75%
2	14	04	201	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100	org	50	0	0%	75	75	75%
2	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1000	ob	300	0	0%	500	500	50%
2	14	04	201	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1000	ob	300	0	0%	500	500	50%
2	14	04	201	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6	lap	6	6	100%	6	12	200%
2	14	04	201	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	100	org	25	100	400%	50	150	150%
2	14	04	201	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2	dok	2	0	0%	2	2	100%
2	14	04	201	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2	dok	2	10	500%	2	12	600%
2	14	04	201	11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100	org	25	0	0%	50	50	50%
2	14	04	201	12	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100	org	25	0	0%	50	50	50%
2	14	04	201	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	12	lap	12	0	0%	12	12	100%
2	14	04	201	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200	keluarga	100	0	0%	125	125	63%
2	14	04	202		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	38	%	38			34.02%		
						Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0.001	%	0.001			0.002		
2	14	04	202	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10	orga	3	0	0%	5	5	50%
2	14	04	202	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	lap	12	0	0%	12	12	100%
2	14	04	202	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10	org	2	0	0%	5	5	50%
2	14	04	202	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	100	org	25	0	0%	50	50	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di setiap SKPD. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai Indikator Program dan Kegiatan kinerja sendiri yang dibuat berdasarkan program dan kegiatan mengacu pada Permendagri no 86 tahun 2017 yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Program dan Kegiatan

No.	Nama Program	Nama Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Rumus
1.	Program Pengendalian Penduduk		Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	$\frac{\text{Jumlah Anak}}{\text{Jumlah Keluarga}}$
	1.1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah Perda atau Perkada tentang pengendalian penduduk
			Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan
	1.2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	$\frac{\text{Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan}}{\text{Jumlah PKB/PLKB}} \times 100$
			Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100$

			Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100$
			Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	$\frac{\text{Jumlah anggaran untuk urusan PPKB}}{\text{Jumlah APBD dan APBDes}} \times 100$
			Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah Sektor

2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	$\frac{\text{Jumlah PUS yang Menggunakan Kontrasepsi}}{\text{Jumlah Akseptor KB}} \times 100\%$
			Ratio Akseptor KB	$\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$
	2.1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang}}{\text{Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak}} \times 100$
	2.2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}$
	2.3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang alkon kab/kota}}{\text{Perkiraan permintaan masyarakat}}$
			Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	$\frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 – 19 th}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15 – 19 th pada pertengahan tahun yang sama}} \times 100\%$

		Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP}}{\text{Jumlah akseptor KB}} \times 100$
	2.4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS}}{\text{Jumlah Faskes dan jejaring}} \times 100$
			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur dengan istri diumur kurang20 th}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$

3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	$\frac{\text{Jmlh. Klpk. Keg. Yg melakukan pemb. Keluarga melalui 8 fungsi keluarga}}{\text{Jumlah kelompok kegiatan}} \times 100\%$
	3.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKB yang ber - KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKB}} \times 100$
			Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKR yang ber - KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKR}} \times 100$
			Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKL yang ber - KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKL}} \times 100$
			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100$

			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	$\frac{\text{Jumlah PIK R/M}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100$
			Rata-rata usia kawin pertama wanita	$\frac{\text{Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)}}{\text{Jumlah wanita menurut usia kawin pertama}} \times 100$
	3.2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber – KB mandiri}}{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS}} \times 100$
			Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	$\frac{\text{Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)}}{\text{Jumlah remaja}} \times 100$

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Identifikasi isu-isu penting berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari. Isu-isu penting dapat dilihat pada tabel 2.4 Sebagai Berikut.

Tabel 2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Total Fertility Rate (TFR)	Masih diatas target nasional	Keinginan membatasi kelahiran masih kurang
2	Meningkatnya Jumlah Kelahiran termasuk angka <i>unmet need</i>	Masih ada faham banyak anak banyak rezeki	Masih memahami bahwa program KB hanya membatasi anak saja
3	CPR (Angka Pemakaian Kontrasepsi)	Kurangnya tenaga medis pemberi layanan KB di tingkat Kelurahan	Tenaga Kurang
4	Urbanisasi	Tingkat perpindahan penduduk tinggi	Susah melaksanakan intervensi terhadap penduduk urbanisasi
5	Pernikahan Usia Dini	Tinggi Pernikahan Usia Dini Tinggi	Batas Usia Pernikahan 19 Tahun
6	Data Sektoral Kependudukan dan Keluarga Berencana	Data Mandiri Belum Tersedia	Perbedaan Data Lintas Sektor.
7	Kelompok Tribina Belum Merata di Seluruh Wilayah	Pembentukan Kelompok Belum Mencapai Target	Sumber Daya Pembentukan Tribina Belum Tersedia.

Seluruh Program dan Kegiatan telah terakomodir dalam Rencana Awal RKPD dengan baik, rencana kerja tahun 2023 merupakan pedoman dasar yang diambil dalam rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023-2026.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada Buku I RPJMN 2020-2024 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah :

1. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka mencapai, mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi;
2. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan;
3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif;
4. Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan segmentasi sasaran dan karakteristik wilayah;
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

Tujuan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari Tahun 2023 adalah : Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan angka kelahiran total.

Sasaran :

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR);
2. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49;
3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need);
4. Laju pertumbuhan penduduk (LPP);
5. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan :

1. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan untuk meningkatkan wawasan tentang pengendalian penduduk dan dampak kependudukan. Kegiatan dari program ini adalah :

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Keluarga Berencana

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alokon bagi keluarga Miskin, pembinaan KB serta pemenuhan sarana prasarana KB.

Kegiatan pada program ini adalah :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Keluarga Sejahtera yang mencakup Tribina yaitu BKB,BKR,BKL dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang berkualitas. Kegiatan pada program ini adalah :

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan pada program ini adalah :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rumusan pagu indikatif pada tiap program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) /Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
								Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Satuan	Target	Kebutuhan Dana
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10
2	14	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendari	100	5,839,716		%	100%	6,307,807	
2	14	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaaam Anggaran Yang Tersedia	Kendari	100	35,629		%	100%	36,698	
2	14	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kendari	2	5,000	APBD	dok	2	5,150	
2	14	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kendari	10	5,000	APBD	dok	10	5,150	
2	14	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kendari	10	5,000	APBD	dok	10	5,150	
2	14	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kendari	10	5,000	APBD	dok	10	5,150	
2	14	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kendari	10	5,000	APBD	dok	10	5,150	
2	14	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kendari	10	5,629	APBD	dok	10	5,798	
2	14	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kendari	5	5,000	APBD	lap	5	5,150	
2	14	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Kendari	100	4,896,992		%	100%	5,043,901	
2	14	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kendari	60	4,861,348	APBD, DAU	Bulan	60	5,007,188	
2	14	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kendari	1	3,000	APBD	dok	1	3,090	
2	14	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kendari	5	1,000	APBD	dok	5	1,030	
2	14	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kendari	1	5,000	APBD	dok	1	5,150	
2	14	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kendari	10	5,000	APBD	lap	10	5,150	
2	14	01	202	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kendari	5	1,000	APBD	lap	5	1,030	
2	14	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kendari	10	18,144	APBD	lap	10	18,688	
2	14	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kendari	5	2,500	APBD	dok	5	2,575	
2	14	01	203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah yang Tersedia	Kendari	100	25,500		%	100%	26,265	
2	14	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kendari	5	2,500	APBD	dok	5	2,575	
2	14	01	203	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kendari	1	2,500	APBD	dok	1	2,575	
2	14	01	203	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kendari	1	5,000	APBD	lap	1	5,150	
2	14	01	203	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kendari	4	5,000	APBD	lap	4	5,150	
2	14	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kendari	4	5,000	APBD	lap	4	5,150	
2	14	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kendari	1	2,500	APBD	lap	1	2,575	
2	14	01	203	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kendari	1	3,000	APBD	dok	1	3,090	
2	14	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian PD Yang Tersedia	Kendari	100	98,400		%	100%	39,552	
2	14	01	205	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kendari	1	10,000	APBD	unit	1	-	
2	14	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kendari	60	15,000	APBD	org	60	-	
2	14	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kendari	1	2,000	APBD	dok	1	2,060	
2	14	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kendari	1	2,500	APBD	dok	1	2,575	
2	14	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kendari	10	2,000	APBD	ok	10	2,060	
2	14	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kendari	4	35,000	APBD	org	4	-	
2	14	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kendari	60	1,000	APBD	org	60	1,030	
2	14	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kendari	5	30,900	APBD	org	5	31,827	
2	14	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	Kendari	100	287,620		%	100%	296,248	
2	14	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kendari	1	5,000	APBD	pkt	1	5,150	

2	14	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kendari	1	18,930	APBD	pkt	1	19,498
2	14	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kendari	1	10,000	APBD	pkt	1	10,300
2	14	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kendari	1	42,197	APBD	pkt	1	43,463
2	14	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kendari	1	51,482	APBD	pkt	1	53,027
2	14	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kendari	1	35,000	APBD	pkt	1	36,050
2	14	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu di OPD	Kendari	100	30,000	APBD	org	100	30,900
2	14	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kendari	60	93,010	APBD	oh	60	95,800
2	14	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kendari	1	1,000	APBD	dok	1	1,030
2	14	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kendari	5	1,000	APBD	dok	5	1,030
2	14	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendari		80,000		%		432,400
2	14	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kendari	1	-	APBD	unit	0	-
2	14	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kendari	0	-	APBD	unit	15	303,650
2	14	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kendari	10	5,000	APBD	pkt	10	51,500
2	14	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kendari	10	20,000	APBD	unit	10	20,600
2	14	01	207	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kendari	10	10,000	APBD	unit	10	10,300
2	14	01	207	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kendari	1	20,000	APBD	pkt	1	20,600
2	14	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kendari	2		APBD	unit	0	-
2	14	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kendari	12	10,000	APBD	unit	12	10,300
2	14	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kendari	5	15,000	APBD	pkt	5	15,450
2	14	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	Kendari	100	97,994		%	100%	100,933
2	14	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kendari	2	2,000	APBD	lap	2	2,060
2	14	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kendari	2	23,625	APBD	lap	2	24,334
2	14	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kendari	5	10,000	APBD	org	5	10,300
2	14	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kendari	66	62,369	APBD	org	66	64,240
2	14	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Kendari	100	317,582		%	100%	331,809
2	14	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendari	5	10,000	APBD	unit	5	15,000
2	14	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendari	95	241,317	APBD	unit	95	248,557
2	14	01	209	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kendari	100	5,000	APBD	unit	100	5,150
2	14	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kendari	102	1,000	APBD	unit	102	1,030
2	14	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kendari	100	1,000	APBD	unit	100	1,030
2	14	01	209	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kendari	10	1,000	APBD	unit	10	1,030
2	14	01	209	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kendari	1	1,500	APBD	unit	1	1,545
2	14	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kendari	12	26,765	APBD	unit	12	27,567
2	14	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kendari	12	20,000	APBD	unit	12	20,600
2	14	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kendari	12	10,000	APBD	unit	12	10,300
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	Kendari	1.74	586,149		Jiwa	1.73 Jiwa	879,224
2	14	02	201		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kendari	2	32,000			2	48,000
						Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		312	60,000			317	90,000
						Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk		100	65,000		%	100%	97,500
2	14	02	201	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	Kendari	2	2,000	APBD, DAK	dok	2	3,000
2	14	02	201	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kendari	1	10,000	APBD, DAK	dok	1	15,000
2	14	02	201	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kendari	100	10,000	APBD, DAK	org	100	15,000
2	14	02	201	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kendari	50	10,000	APBD, DAK	org	50	15,000
2	14	02	201	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kendari	10	10,000	APBD, DAK	dok	10	15,000

2	14	02	201	06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Kendari	10	10,000	APBD, DAK	dok	10	15,000
2	14	02	201	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kendari	5	10,000	APBD, DAK	materi	5	15,000
2	14	02	201	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kendari	5	5,000	APBD, DAK	materi	5	7,500
2	14	02	201	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Kendari	100	15,000	APBD, DAK	org	100	22,500
2	14	02	201	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Kendari	50	10,000	APBD, DAK	org	50	15,000
2	14	02	201	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kendari	50	10,000	APBD, DAK	org	50	15,000
2	14	02	201	12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kendari	100	15,000	APBD, DAK	org	100	22,500
2	14	02	201	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kendari	100	15,000	APBD, DAK	org	100	22,500
2	14	02	201	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kendari	100	15,000	APBD, DAK	org	100	22,500
2	14	02	201	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kendari	50	10,000	APBD, DAK	org	50	15,000
2	14	02	202	202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Kendari	73	45,000		%	75%	67,500
						Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		31	82,949		%	33%	124,424
						Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dab APBDcs		14.37	231,600		%	16.37%	347,400
						Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		24	69,600		%	26%	104,400
2	14	02	202	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	Kendari	1	10,000	APBD, DAK	dok	1	15,000
2	14	02	202	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kendari	1	10,000	APBD, DAK	dok	1	15,000
2	14	02	202	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kendari	2	10,000	APBD, DAK	dok	2	15,000
2	14	02	202	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Kendari	1	15,000	APBD, DAK	dok	1	22,500
2	14	02	202	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Kendari	1	10,000	APBD, DAK	dok	1	15,000
2	14	02	202	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kendari	1	15,000	APBD, DAK	dok	1	22,500
2	14	02	202	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>Early Warning System</i> /Peringatan Dini)	Jumlah Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>Early Warning System</i> /Peringatan Dini)	Kendari	1	15,000	APBD, DAK	dok	1	22,500
2	14	02	202	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Kendari	5	32,949	APBD, DAK	Lokasi	5	49,424
2	14	02	202	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kendari	12	10,000	APBD, DAK	laporan	12	15,000
2	14	02	202	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Kendari	5	30,000	APBD, DAK	data	5	45,000
2	14	02	202	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kendari	5	201,600	APBD, DAK	dok	5	302,400
2	14	02	202	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kendari	12	15,000	APBD, DAK	dok	12	22,500
2	14	02	202	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kendari	12	39,600	APBD, DAK	dok	12	59,400
2	14	02	202	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Kendari	6	15,000	APBD, DAK	laporan	6	22,500
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Kendari	100	2,592,050		%	100%	3,888,075
						Ratio Akseptor KB	Kendari	45	109,142		%	50%	163,713
2	14	03	201		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Kendari	21.7	1,494,810		%	36.70%	2,242,215
2	14	03	201	01	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kendari	100	20,000	APBD, DAK	org	100	30,000

2	14	03	201	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Realisasi Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kendari	5	5,000	APBD, DAK	dok	5	7,500
2	14	03	201	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Tempat Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK yang tersalurkan	Kendari	11	15,000	APBD, DAK	lokasi	11	22,500
2	14	03	201	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kendari	6	285,000	APBD, DAK	dok	6	427,500
2	14	03	201	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kendari	3	10,000	APBD, DAK	keg	3	15,000
2	14	03	201	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Cakupan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kendari	100	695,700	APBD, DAK	org	100	1,043,550
2	14	03	201	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Cakupan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kendari	430	454,110	APBD, DAK	org	430	681,165
2	14	03	201	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Pengendalian Program KKBPK	Kendari	1	10,000	APBD, DAK	laporan	1	15,000
2	14	03	202		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Kendari	100	1,087,240		%	100%	1,630,860
2	14	03	202	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kendari	100	10,000	APBD, DAK	org	100	15,000
2	14	03	202	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Cakupan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kendari	16	108,900	APBD, DAK	pkt	16	163,350
2	14	03	202	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kendari	12	968,340	APBD, DAK	laporan	12	1,452,510
2	14	03	203		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Kendari	71	32,282		%	73%	48,423
					Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)			0.23	24,860		%	0.21%	37,290
					Presentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			29.83	40,000		%	31.83%	60,000
2	14	03	203	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kendari	12	5,000	APBD, DAK	lap	12	7,500
2	14	03	203	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kendari	500	5,000	APBD, DAK	org	500	7,500
2	14	03	203	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Kendari	100	10,000	APBD, DAK	org	100	15,000
2	14	03	203	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Cakupan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kendari	5	5,000	APBD, DAK	org	5	7,500
2	14	03	203	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kendari	12	2,500	APBD, DAK	dok	12	3,750
2	14	03	203	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Cakupan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kendari	10	5,000	APBD, DAK	pkt	10	7,500
2	14	03	203	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kendari	500	5,000	APBD, DAK	org	500	7,500
2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kendari	12	5,000	APBD, DAK	lap	12	7,500
2	14	03	203	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Cakupan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kendari	100	5,000	APBD, DAK	org	100	7,500
2	14	03	203	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Cakupan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kendari	50	20,000	APBD, DAK	org	50	30,000
2	14	03	203	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Cakupan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kendari	60	19,782	APBD, DAK	gerak	60	29,673
2	14	03	203	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kendari	100	5,000	APBD, DAK	org	100	7,500
2	14	03	203	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Cakupan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kendari	20	4,860	APBD, DAK	org	20	7,290
2	14	03	204		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Kendari	75	10,000		%	77%	15,000
					Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun			0.55	12,000		%	0.50%	18,000
2	14	03	204	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kendari	10	10,000	APBD, DAK	klpk	10	15,000
2	14	03	204	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kendari	12	2,000	APBD, DAK	keg	12	3,000
2	14	03	204	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kendari	324	5,000	APBD, DAK	keg	324	7,500
2	14	03	204	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kendari	324	5,000	APBD, DAK	lap	324	7,500
2	14	04			Program Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Kendari	44	2,719,280		%	47%	1,552,500
2	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Kendari	64	930,000		%	74%	532,610
					Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB			43	615,000		%	53%	350,550
					Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB			9	1,034,280		%	14%	589,540
					Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan			92	15,000		%	93%	8,550
					Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa			474	20,000		%	476%	11,400
					Rata-rata usia kawin pertama wanita			20	50,000		Tahun	20 Thn	28,500

2	14	04	201	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kendari	25	15,000	APBD, DAK	klpk	25	11,060
2	14	04	201	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kendari	25	900,000	APBD, DAK	klpk	25	513,000
2	14	04	201	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kendari	100	15,000	APBD, DAK	org	100	8,550
2	14	04	201	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kendari	100	15,000	APBD, DAK	org	100	8,550
2	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kendari	1000	600,000	APBD, DAK	ob	1000	342,000
2	14	04	201	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kendari	1000	600,000	APBD, DAK	ob	1000	342,000
2	14	04	201	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kendari	6	434,280	APBD, DAK	lap	6	247,540
2	14	04	201	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kendari	100	10,000	APBD, DAK	org	100	5,700
2	14	04	201	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kendari	2	5,000	APBD, DAK	dok	2	2,850
2	14	04	201	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kendari	2	5,000	APBD, DAK	dok	2	2,850
2	14	04	201	11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kendari	100	15,000	APBD, DAK	org	100	8,550
2	14	04	201	12	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kendari	100	15,000	APBD, DAK	org	100	8,550
2	14	04	201	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kendari	12	5,000	APBD, DAK	lap	12	2,850
2	14	04	201	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kendari	200	30,000	APBD, DAK	keluarga	200	17,100
2	14	04	202		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Kendari	38	20,000		%	43%	11,400
						Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Kendari	0.001	35,000		%	0.001%	19,950
2	14	04	202	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kendari	10	15,000	APBD, DAK	orga	10	8,550
2	14	04	202	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kendari	12	5,000	APBD, DAK	lap	12	2,850
2	14	04	202	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kendari	10	15,000	APBD, DAK	org	10	8,550
2	14	04	202	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kendari	100	20,000	APBD, DAK	org	100	11,400

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan acuan dalam penyusunan Dokumen Anggaran melalui mekanisme menurut ketentuan Undang- undang. Dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari, Rencana Kerja ini memerlukan evaluasi dari berbagai pihak yang terkait agar program dan kegiatan selanjutnya akan lebih baik dan tepat sasaran.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari Tahun 2023 ini dibuat, apabila masih ada kekurangan dalam penyusunan, kami harapkan adanya masukan yang konstruktif agar pembuatan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari tahun mendatang akan lebih baik.

Kendari, April 2022
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Kendari

Drs. H. JAHUDDING, M.Si
Pembina Tk.I Gol.IV/b
NIP. 19680303 199603 1 003